

BAB 1

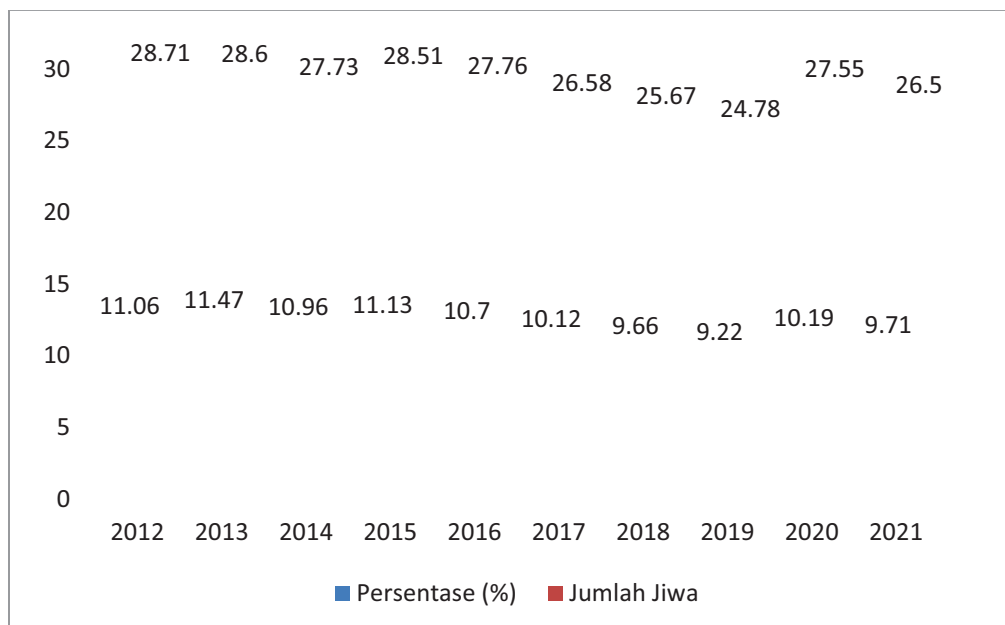
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah krusial dalam ekonomi. Berbagai program telah dilaksanakan guna mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Setelah implementasi MDGs pada Desember 2015 berakhir, usaha memerangi kemiskinan berlanjut dengan penetapan *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebagaimana program pembangunan sebelumnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pencapaian tujuan tersebut. Masalah-masalah meliputiinya mencakup kelaparan, ketimpangan sosial, dan sebagainya. SDGs memiliki 17 poin prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, pencapaian kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan, air bersih dan sanitasi layak, energi yang bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, perindustrian dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kegiatan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan masalah iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian,

keadilan, dan kelembagaan, serta kemitraan dalam mencapai tujuan.

Sebagai salah satu negara yang mengikuti kedua deklarasi tersebut, Indonesia telah dan sedang berusaha untuk mencapai poin-poin SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang cenderung menurun sejak 1999 hingga 2019. Sayangnya, tingkat kemiskinan kembali meningkat pada 2020 diakibatkan pandemi Covid-19 yang menciptakan krisis kesehatan dan resesi ekonomi. Meski begitu, tingkat kemiskinan di Indonesia kembali turun pada 2021 sebagai bagian dari hasil pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19. Penurunan ini merupakan kabar baik meskipun belum dapat menutupi kenaikan yang terjadi pada tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).



Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022)

Gambar 1. 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin 2012-2021

Isu pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian akademisi dan peneliti. Banyak studi telah membahas tentang kemiskinan dari berbagai sudut pandang dan metode. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan pelbagai pandangan dan model pengentasan kemiskinan dengan banyak kombinasi variabel. Menurut Dartanto & Nurkholis (2013), misalnya, faktor dinamika kemiskinan di Indonesia adalah pencapaian pendidikan, aset fisik, status pekerjaan, jumlah anggota keluarga, masalah kesehatan, akses listrik, program kredit mikro, dan perubahan sektor pekerjaan. Sementara itu, De Silva (2008) mengungkapkan bahwa ukuran rumah tangga, kepala rumah tangga yang diisi perempuan, domisili di daerah pedesaan, dan status sebagai pekerja biasa akan meningkatkan probabilitas kemiskinan. Pendidikan kepala rumah tangga juga akan berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup suatu keluarga.

Sejalan dengan itu, Garza-Rodriguez et al. (2021) menemukan bahwa usia kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, sektor pekerjaan, status perkawinan, dan tempat tinggal berpengaruh terhadap kemiskinan. Lebih lanjut, kemungkinan menjadi miskin akan meningkat jika kepala rumah tangga adalah perempuan, hanya menguasai bahasa daerah, dan anggota rumah tangga lebih dari satu.

Penelitian tentang kemiskinan tidak hanya sebatas pada faktor apa saja yang dapat memengaruhi kemiskinan, tetapi juga meliputi pengembangan model pengentasan kemiskinan. Lin et al. (2020) mengungkapkan bahwa

kewirausahaan di suatu daerah dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk menetapkan kebijakan peningkatan lingkungan bisnis di pedesaan dan daerah tertinggal. Erlando, Riyanto, et al. (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan erat antara inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada tingkat inklusi keuangan dan berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Namun dalam penelitian tersebut, inklusi keuangan justru berpengaruh positif terhadap ketimpangan yang berujung pada meluasnya ketimpangan pendapatan.

Lebih lanjut, penelitian Ye et al., (2022) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi finansial (*fintech*) efektif dalam mengurangi kemiskinan. Efek positif *fintech* terhadap pengentasan kemiskinan bahkan jauh lebih kuat di provinsi berpenghasilan rendah daripada di provinsi berpenghasilan tinggi. Sementara itu, Islam & Alam (2018) menemukan bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan sosial, norma timbal balik, kepercayaan sosial, dan partisipasi masyarakat berkaitan dengan kemiskinan. Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi strategi pengentasan kemiskinan.

Selain penelitian-penelitian tersebut, banyak riset yang berkorelasi dengan usaha pengentasan kemiskinan dari berbagai aspek. Studi-studi tersebut misalnya terkait wisata (Zhao & Ritchie, 2007), pemberdayaan perempuan (Isiaka et al., 2013), pendidikan (Omoniyi, 2014), *governmen transfers* (Lu et

al., 2020), *socio-economic* dan *demographic factors* (Ahmad & Faridi, 2020), dan sejenisnya.

Sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki perspektif dan konsep yang seimbang terkait kemiskinan. Konsep tentang kekayaan dan kemiskinan tidak hanya terkait pada aspek kepemilikan materi, tetapi juga terkait aspek spiritual (Ahmed, 2004). Islam juga memiliki konsep tentang pengentasan kemiskinan sebagaimana yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para cendekiawan muslim.

Dalam Al-Qur'an, usaha pengentasan kemiskinan disebutkan secara eksplisit dan implisit. Penyebutan secara eksplisit misalnya pada Surat ad-Dhuha ayat 8-11, Surat al-Mudatsir ayat 42-44, Surat adz-Dzariyat ayat 25, dan Surat al-Ma'un ayat 1-3. Secara implisit, usaha pengentasan kemiskinan terdapat misalnya pada ayat tentang perintah bekerja (QS. al-Ankabut: 17), keadilan distribusi (QS. al-Hasyr: 7), larangan tindakan curang dalam ekonomi (QS. Al-Mutaffifin:1-3), perintah zakat, infak, dan sedekah, serta ayat-ayat lain sejenis.

Selanjutnya dalam hadis, Nabi merupakan sosok yang dekat dengan anak yatim dan sahabat bagi orang miskin. Sebuah hadis bahkan menyebutkan bahwa Nabi berdoa untuk dikumpulkan bersama orang-orang miskin sebagai bukti keberpihakan beliau pada mereka (H.R at-Tirmidzi). Selain itu, terdapat beberapa pendapat dan konsep pengentasan kesmiskian yang disampaikan para

cendekiawan muslim. Sebagai contoh, Ali bin Abi Talib memandang urgensi keadilan dalam pengentasan kemiskinan (Mohseni-cheraghloo, 2015), Ibn Khaldun mengajukan gagasan multidimensi tentang pembangunan (Akhmad Affandi & Astuti, 2014), dan Qardhawi mempunyai gagasan teologi kemiskinan (Qardhawi, 2002).

Pada era modern, dijumpai pula berbagai model empiris pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam. Sebagai contoh yakni penelitian Affandi & Puji Astuti (2014) yang mengkaji model dinamis teori pembangunan multidimensi Ibn Khaldun terhadap pengentasan kemiskinan, penelitian Mariyanti & Mahfudz (2016) yang mengkaji peran pemerintah, ZIS, dan BMT terhadap pengentasan kemiskinan, hingga penelitian Senadjki (2014) tentang pengaruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman terhadap pengentasan kemiskinan.

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian Affandi & Puji Astuti (2014), misalnya, tidak mengakomodasi peran zakat sebagai salah satu variabel dalam model pengentasan kemiskinan. Padahal dalam Islam, zakat memegang peran penting sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan (Abdullah et al., 2015; Ahmed, 2004; Badan Amil Zakat Nasional, 2020; Hafandi & Helmy, 2021; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Rahman & Siradjuddin, 2020; Sadeq, 1997; Shaikh, 2016). Sementara itu,

meskipun model empiris Mariyanti & Mahfudz (2016) telah mengakomodasi berbagai macam variabel termasuk zakat, infak, shadaqah dan BMT, model tersebut tidak mengakomodasi variabel inklusi dan ketimpangan. Padahal, inklusi dan ketimpangan merupakan hal yang tidak kalah penting karena bisa saja secara makro ekonomi suatu negara menunjukkan pertumbuhannya, tetapi di sisi lain tingkat kemiskinan tidak berkurang bahkan bertambah karena ketidakmerataan ekonomi (Ahmed, 2004; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Mohseni-cheraghloo, 2015). Oleh karena itu, pertumbuhan negara hanya dirasakan oleh beberapa pihak. Adapun penelitian Senadjki & Sulaiman (2015) mengulas pengentasan kemiskinan dari sisi mikro, meso, dan makro. Namun, penelitian tersebut tidak mempertimbangkan keterkaitan tiga hal tersebut (Senadjki & Sulaiman, 2015).

Bukti-bukti di atas menegaskan bahwa studi empiris tentang pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam masih terbatas dan hanya dilakukan secara parsial terkait pada variabel yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penulis bermaksud melengkapi penelitian-penelitian tersebut dengan mengajukan model empiris pengentasan kemiskinan secara lebih lengkap. Dengan merujuk penelitian-penelitian terdahulu seperti model pengentasan kemiskinan menurut Akhmad Affandi & Astuti (2014), Mariyanti & Mahfudz (2016), Rahman & Siradjuddin (2020), Sadeq (1997), dan Salleh (2017), penelitian ini akan mengkaji pengentasan kemiskinan dalam Islam

dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang menurut penelitian terdahulu diyakini berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

Aspek-aspek tersebut meliputi peningkatan pendapatan (Akhmad Affandi & Astuti, 2014; Erlando et al., 2020; Michalek & Jan Vybostok, 2019; Mohammed et al., 2021), peningkatan distribusi fungsional pendapatan yang adil (Rahman & Siradjuddin, 2020; Scalioni Brito & Lessa Kerstenetzky, 2019; Wu et al., 2015), pemberian kesempatan yang sama untuk semua (Harper et al., 2003; Hipsher, 2019; Omoniyi, 2014; Rahman et al., 2021), kontrol kepemilikan atas sumber daya tertentu yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak (Biltonen & Dalton, 2003; Ladi et al., 2021; Pandey et al., 2022), larangan malapraktik ekonomi yang merugikan (Cotte Poveda, 2011; Hazra, 2020; Mukherjee, 2019), pembayaran transfer wajib melalui zakat dan transfer yang direkomendasikan melalui amal (Abdullah et al., 2015; Ayuniyyah et al., 2022; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Rahman & Siradjuddin, 2020; Shaikh, 2016), serta peran dan tanggung jawab negara (Akhmad Affandi & Astuti, 2014; Fadly et al., 2021; Lu et al., 2020; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Rahman et al., 2021; Rahman & Siradjuddin, 2020) dalam pengentasan kemiskinan Islam.

Dengan merujuk teori yang ada dan penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud menganalisis variabel-variabel tersebut dengan pengujian model empiris tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, menurut Badan

Pusat Statistik (2021), total penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen. Jumlah tersebut meningkat 0,14 persen atau sekitar 1,13 juta jiwa dari Maret 2020 dan naik 0,97 persen atau setara 2,76 juta jiwa dibandingkan statistik pada September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal tersebut menarik untuk diteliti, mengingat Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbanyak di dunia dan anggota OKI dengan total GDP terbesar pada 2020.

pPengujian dilakukan pada variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dalam Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adapun aspek pertama dalam pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam adalah instrumen transfer wajib yang berupa kewajiban membayar zakat. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat berpotensi menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan (Ayuniyyah et al., 2022). Untuk itu, optimalisasi pengelolaan zakat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sejalan dengan itu, berbagai studi empiris telah dilakukan tentang pentingnya distribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Abdullah et al., 2015; Ayuniyyah et al., 2022; Hafandi & Helmy, 2021; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Purbasari et al., 2020; Shaikh, 2016). Pada era modern, integrasi antara kedua instrumen tersebut dengan sistem keuangan Islam dapat menjadi sarana yang kuat untuk pengentasan kemiskinan (Senadjki & Sulaiman, 2015).

Aspek kedua adalah perintah bekerja guna menghasilkan pendapatan. Peningkatan pendapatan membuat seseorang secara mikro dapat meningkatkan daya beli dan taraf hidup. Dengan kata lain, eskalasi pendapatan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan seseorang hingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan demikian, secara makro pertumbuhan ekonomi akan terjadi dengan naiknya produk domestik bruto (PDB) yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan agregat di wilayah tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel PDB menunjukkan pengaruh negatif signifikan variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan (Akhmad Affandi & Astuti, 2014; Erlando et al., 2020; Michalek & Jan Vybostok, 2019; Mohammed et al., 2021). Meskipun demikian, menurut Afandi et al. (2017), Dahlia & Nur, (2021), dan Hassan (2015), pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah peran negara. Negara wajib menciptakan program dan sarana yang dapat mengatasi masalah kemiskinan, memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi masyarakat miskin, dan menyediakan sarana ekonomi yang dibutuhkan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat miskin (Rahman & Siradjuddin, 2020). Dalam Islam, negara harus mempunyai sumber daya yang dikelola sebagai kekayaan publik dan digunakan untuk kepentingan negara (Rahman & Siradjuddin, 2020). Dengan demikian, negara dapat mentransfer sumber daya tambahan dari

kelompok penduduk berpenghasilan tinggi ke berpenghasilan rendah guna mengatasi kemiskinan.

Kemudian, dalam banyak kondisi, pertumbuhan ekonomi tidak diiringi penurunan tingkat kemiskinan penduduknya. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kalangan dan meninggalkan sebagian lain. Maka dari itu, aspek berikutnya dalam penelitian ini adalah distribusi fungsional pendapatan yang adil. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa distribusi yang stagnan akan menyebabkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, prioritas pengentasan kemiskinan menurut konsep ekonomi Islam adalah dengan mengatasi penyebab kemiskinan itu sendiri, yakni melalui eskalasi distribusi kekayaan (Rahman & Siradjuddin, 2020). Distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan penyebab utama atas keberadaan kemiskinan (Wu et al., 2015). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dari upah yang terkait dengan urbanisasi merupakan penyebab penting kemiskinan dan efeknya terus meningkat. Sejalan dengan itu, menurut Yao et al. (2004), efek ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan lebih tinggi daripada efek peningkatan pendapatan rata-rata per kapita.

Ketimpangan terjadi tidak hanya pada distribusi pendapatan, tetapi juga dalam kesempatan mengakses peluang. Padahal, akses kurang terhadap kesempatan dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi seseorang. Salah satu cara untuk meningkatkan kesetaraan pendapatan atau kekayaan adalah dengan

fokus pada kesetaraan peluang (Hipsher, 2019). Maka dari itu, aspek berikutnya dalam penelitian ini adalah aspek kesempatan yang sama. Sejalan dengan ini, menurut Rahman et al., (2021), salah satu strategi pengentasan kemiskinan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz adalah dengan membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk berbisnis. Program ini mendorong masyarakat untuk bekerja dan produktif. Pemberian kesempatan yang sama juga berarti pemberian akses pendidikan kepada setiap orang. Penelitian Harper et al. (2003), sebagaimana yang dikutip oleh Janjua & Kamal (2011), menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Pendidikan formal yang berkualitas baik akan memperluas cakrawala dan meningkatkan peluang kerja dengan gaji yang lebih baik dan aman serta kesejahteraan umum.

Selain itu, dalam usaha mengurangi kemiskinan, diperlukan pula tindakan yang dapat mencegah konsentrasi kekayaan. Islam memiliki ketentuan yang mengatur permasalahan kepemilikan terhadap sumber daya tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini memberikan gagasan betapa pentingnya akses terhadap jenis sumber daya tersebut, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Maka dari itu, aspek berikutnya yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah kontrol kepemilikan atas sumber daya tertentu.

Salah satu sumber daya yang dimaksud adalah air. Air telah diidentifikasi sebagai sumber daya penting untuk semua kehidupan, produksi,

dan pembangunan. Akses mini terhadap air dikaitkan dengan kemiskinan (Biltonen & Dalton, 2003). Sejalan dengan itu, menurut Pandey et al. (2022), ketersediaan akses terhadap air dan parameter pendukungnya seperti jarak ke sumber air, kualitas air, dan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan air, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia--bahkan terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan ketersediaan akses air (Pandey et al., 2022). Penargetan kemiskinan terkait pengelolaan sumber daya air yang tepat adalah suatu keharusan, mengingat kebutuhan air negara terus meningkat sementara ketersediaan air semakin berkurang.

Aspek terakhir yang menjadi fokus penelitian ini adalah pencegahan malapraktik yang merugikan. Islam menetapkan etika yang melarang umatnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk dalam ekonomi. Oleh karena itu, semua praktik yang berimplikasi pada hasil yang tidak diinginkan secara sosial, termasuk ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, harus dicegah. Hal ini tampak dari larangan perjudian, pencurian, penimbunan, suap, riba, akuisisi harta yang bukan hak, dan lain sebagainya. Jika semua malapraktik seperti itu dapat dikendalikan secara efektif, konsentrasi pendapatan dan dampak negatif yang diakibatkannya, yaitu kemiskinan, dapat dicegah secara signifikan (Sadeq, 1997).

Sejalan dengan itu, menurut Banerjee (2016), tindakan pelanggaran norma kepatutan sosial dapat menimbulkan kerusakan pada tingkat kepercayaan masyarakat. Bahkan menurut Palokoto et al. (2020), kejahatan dapat pula menyebabkan jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam kejahatan yang tinggi dan produksi yang rendah. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dalam Islam juga memandang kewajiban pencegahan praktik ekonomi yang merugikan dan dapat memicu ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul: **MODEL EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah transfer wajib dan *charity* berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- 1.2.3 Apakah tanggung jawab negara berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

- 1.2.4 Apakah distribusi fungsional pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- 1.2.5 Apakah persamaan kesempatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- 1.2.6 Apakah kontrol kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
- 1.2.7 Apakah pencegahan malapraktik dalam ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian/pengujian model empiris pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1. Menganalisis apakah transfer wajib dan *charity* berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- 1.3.2. Menganalisis apakah peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- 1.3.3. Menganalisis apakah tanggung jawab negara berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- 1.3.4. Menganalisis apakah distribusi fungsional pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

- 1.3.5. Menganalisis apakah persamaan kesempatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- 1.3.6. Menganalisis apakah kontrol kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- 1.3.7. Menganalisis apakah pencegahan malapraktik dalam ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dituju oleh peneliti ditinjau secara teoretis dan praktis yakni sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi literatur sebelumnya terkait pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam disertai bukti empiris yang kuat. Penelitian ini juga dapat memberikan dasar pengembangan bagi para peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan bukti empiris tentang pengaruh model pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran bagi lembaga amil zakat, infak dan sedekah, terutama BAZNAS, tentang pengaruh atau dampak zakat, infak, dan sedekah terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan begitu, studi ini dapat memberikan gagasan terkait pengembangan program pengumpulan dan penyaluran dana agar lebih efektif dan berdampak terhadap kemiskinan. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pertimbangan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan, terkait hal yang masih harus dioptimalisasi dalam penyusunan dan implementasi strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Sebagai publikasi hasil penelitian ilmiah, penulisan tesis ini mengikuti sistematika yang ada, yang terdiri atas lima bab yaitu: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan diakhiri dengan Penutup. Masing-masing bab terdiri atas beberapa bagian yang akan dibahas sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam penelitian ini, pendahuluan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi sebagai landasan

pemikiran secara umum terkait pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam.

Bab II Tinjauan pustaka

Bab ini menguraikan kerangka teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka berisi teori dan konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam. Adapun kajian teori yang digunakan meliputi problematikan kemiskinan dan pengentasannya, pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual penelitian, hipotesis, dan model penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan guna menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini, Bab 3 akan mendeskripsikan secara utuh metode penelitian, pendekatan penelitian, definisi variabel, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian, pembahasan detail mengenai hasil analisis, serta perhitungan dan bukti empiris hasil pengestimasi model. Dalam bab ini, peneliti melakukan interpretasi dan analisis atas model dan variabel dengan mengkaitkannya pada tinjauan pustaka dan temuan penelitian sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang memuat ringkasan secara umum hasil penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan. Selain itu, bab ini memuat uraian tentang implikasi penelitian yang memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan peneliti. Selanjutnya, bab ini dilengkapi dengan keterbatasan penelitian serta arah penelitian sejenis berikutnya.